

Selesai Direnovasi, Mal Sarinah Kembali Beroperasi

JAKARTA (IM) - Pusat perbelanjaan Sarinah di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat beroperasi kembali mulai Senin setelah sebelumnya ditutup karena direnovasi sejak 2020.

Melihat di lapangan, Senin (21/3), beberapa gerai di lantai dasar sudah mulai buka seperti toko pakaian berbahan batik "Sarinah Departement Store" hingga sejumlah restoran. Namun beberapa di antaranya belum dibuka.

Di lantai dasar terlihat pameran foto yang menunjukkan rekam jejak perjalanan pusat perbelanjaan Sarinah sejak awal dibangun hingga tampilan baru saat ini.

Naik ke lantai satu menggunakan eskalator di bagian tengah, pengunjung disambut dengan Sarinah Departement Store di sisi kiri eskalator. Gerai lainnya dilantai satu seperti toko kue, restoran, dan kedai kopi. Baik tempat makan "franchise", restoran ma-

sakan Indonesia, maupun masakan Jepang.

Di lantai satu, mayoritas gerai diisi oleh produk makanan, tapi belum semua gerai beroperasi.

Naik ke lantai dua menggunakan eskalator di bagian tengah, pengunjung disambut dengan gerai salon dan spa dan restoran. Ada sejumlah restoran, baik masakan Indonesia, masakan Jepang, maupun masakan Eropa. Tampak sejumlah pengunjung menikmati hidangan di beberapa restoran.

Naik ke lantai tiga menggunakan eskalator di bagian tengah, masih ada gerai Sarinah yang menawarkan aneka produk mulai dari furnitur, aksesoris, hingga souvenir seperti wayang, kerajinan dari bahan rotan dan bambu, maupun hiasan dinding.

Sedangkan, lantai empat masih ditutup. Belum diketahui apa yang akan diujakan oleh pengelola pusat perbelanjaan Sarinah di lantai empat tersebut. ● yan

Betonisasi Jalan Baru Cipendawa Didanai Kementerian PUPR

FOTO: MADONG LUBIS, INTERNATIONAL MEDIA, MINGGU (6/3).



Betonisasi Jalan Baru Cipendawa, Kota Bekasi.

KOTA BEKASI (IM) - Betonisasi Jalan Baru Cipendawa, Bojongmenteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dipertanyakan. Pasalnya, saat pelaksanaan tidak ada papan nama sehingga menimbulkan kebingungan masyarakat.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi, Zainal, saat dihubungi melalui ponselnya mengatakan, jika kegiatan tersebut didanai pemerintah pusat.

"Dari pusat, pak. Lebih jelas, ke bidang BM, ya pak," tulisnya melalui pesan WhatsAppnya, Senin (21/3).

Senada, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Bekasi, Idi, saat dikonfirmasi terkait sumber dana Betonisasi Jalan Baru Cipendawa itu mengatakan, jika pendanaannya bersumber dari Kementerian

PUPR. "Dari bbwsc (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane-red). Kementerian pupr (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-red), sebutnya dalam pesan WhatsApp, Senin (21/3).

Kapasitas Pemerintah Kota Bekasi sendiri atas kegiatan itu, kata dia, hanya mengusulkan saja. "Menguatkan aja," tulisnya singkat. Bahkan, menyangkut perencanaan, spesifikasi, akunya, dibuatkan oleh pusat. "Pusat," tulisnya.

Pemerintah Kota Bekasi saat pelaksanaan pekerjaan, akunya lagi, tidak dilibatkan samasekali. "Tidak. Karena, memang anggaran dan kewenangannya semua di mereka," tulisnya.

Menurut Idi, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan Betonisasi Jalan Baru Cipendawa tersebut sekitar dua bulan yang lalu. "Sekitar 2 bulan yg lalu," tulisnya. ● mdl

Satpol PP DKI Jakarta Awasi Peredaran Miras Selama Ramadhan

JAKARTA (IM) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah memetakan potensi pelanggaran ketertiban umum dan mengawasi peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras), serta praktik asusila selama Ramadhan.

"Kami lakukan patroli pengawasan di berbagai tempat di lokasi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berada. Kami edukasi, ingatkan, kemudian kami lakukan pembinaan dengan Dinas Sosial," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Senin (21/3).

Untuk memastikan kesiapan pengawasan, Satpol PP DKI menggelar apel kesiapsiagaan dan antisipasi gangguan ketertiban serta ketertiban umum menjelang Ramadhan di Monas. Selain peredaran minuman beralkohol, potensi munculnya PMKS di setiap sudut-sudut kota dan jalan-jalan umum juga menjadi fokus Satpol PP.

"Saya minta untuk mengingatkan dan mengedukasi seluruh masyarakat agar Jakarta menjadi kota yang tertib, teratur dan nyaman selama Ramadhan, agar semua

masyarakat bisa menjalani ibadah dengan nyaman dan tenteram," katanya.

Arifin mengatakan, penindakan pelanggaran ketertiban selama bulan Ramadhan dan penindakan disiplin protokol kesehatan (prokes) juga tetap diterapkan dan diperhatikan selama pengawasan.

"Cara bertingkahnya pun tidak menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan. Masyarakat harus terus menerus kami ayomi, ingatkan, edukasi untuk memahami dan menjalankan, melaksanakan ketentuan daerah," katanya.

Selain Satpol PP DKI Jakarta, kata dia, TNI/Polri juga terlibat dalam pengendalian ribuan personel gabungan. Personel gabungan tersebut dikerahkan untuk melakukan patroli intensif mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban dan ketertiban umum.

"Walaupun situasi penanganan pandemi Covid-19 sudah semakin membaik, bukan berarti kita mengabaikan prokes. Tindakan tegas sebagaimana yang diatur dalam perda tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kita," katanya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



MAL SARINAH KEMBALI DIBUKA Sejumlah warga mengunjungi "sky deck" saat pembukaan kembali Mal Sarinah di Jakarta, Senin (21/3). Mal pertama di Indonesia tersebut kembali dibuka untuk umum setelah selesai direnovasi sejak 2020.

WARGA SUDAH LAPOR TAPI TAK DIRESPON

Pabrik Plastik di Kapuk Muara Tebar Polusi dan Timbulkan Bau

Sunardi, salah satu warga mengatakan, keluhan itu sudah diadukannya kepada pihak berwenang beberapa waktu lalu. Bahkan, Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara pada 2020 lalu pernah melakukan pengujian baku tingkat kebauan dan tingkat kebisingan serta pencemaran udara, dan hasilnya kadar ammonia jauh di atas baku mutu yang ditetapkan aturan, katanya.

JAKARTA (IM) - Warga di RW05, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeluhkan pencemaran udara yang ditimbulkan dari pabrik pengolah plastik. Selain kerap menebar bau, operasional pabrik selama 24 juga menimbulkan kebisingan.

Sunardi, salah satu warga mengatakan, adanya keluhan itu sudah diadukannya kepada pihak berwenang. Bahkan, pihak Suku Dinas

Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara pada 2020 lalu pernah melakukan pengujian baku tingkat kebauan dan tingkat kebisingan.

"Pengujian pencemaran udara itu dilaksanakan Juli 2020 dan hasilnya kadar ammonia jauh di atas baku mutu yang ditetapkan aturan," katanya, Senin (21/3).

Dijelaskan Sunardi, sesuai Kepmen LH nomor 50 tahun 1996 baku mutu tingkat am-

monia yang diperbolehkan hanya sebatas 2.00 ppm saja. Realitasnya selama lima hari pemeriksaan, angka tertinggi ammonia yang terbaca di mesin uji mencapai 100.03 ppm.

Sedangkan baku mutu kebisingan sesuai dengan Kepribadian nomor 551 tahun 2001, tingkat toleransi kebisingan diakibatkan yakni sebesar 55 dB(A).

Faktanya dari lima kali pemeriksaan di Juli 2020, level kebisingan tertinggi mencapai 60.1 dB(A) dan terendah 56.1 dB(A).

"Sayangnya, ketika kami adukan kembali ke Suku Dinas LH Jakarta Utara mereka tidak menanggapi. Bahkan saya suruh lapor langsung ke tingkat Dinas," ujarnya.

Permintaan yang langsung disampaikan oleh Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara kepadanya, dinilai Sunardi membicarakan.

Layaknya satu institusi, bila memang kewenangan penindakan ada di tingkat provinsi,

kenapa pihak Suku Dinas LH Jakarta Utara tidak langsung menyampaikan laporan tersebut ke tingkat DKI Jakarta secara kelembagaan.

"Nilah yang tidak habis pikir saya. Kenapa yang sudah jelas melanggar dan ada hasil ujinya tapi tidak ditindak," tegasnya. ● yan

Pemprov DKI Diminta Turun Tangan Selesaikan Kasus Abu Batu Bara

JAKARTA (IM) - Pengamat Kebijakan Publik, Afif Rifai, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera turun tangan menyelesaikan masalah debu batu bara yang hingga saat ini masih menjadi persoalan warga rumah susun (rusun) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Arif mengatakan Dinas Lingkungan Hidup harus mengambil tindakan cepat untuk menghentikan aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Pasalnya, dampak yang ditimbulkan bisa merusak lingkungan dan kesehatan warga rusun Marunda.

"Ini harus segera dilakukan kalau bisa harus segera dihentikan aktivitasnya bongkar muatnya," kata Arif, saat dihubungi Senin (21/3).

Arif juga mengatakan Dinas LH DKI Jakarta sebaiknya datang langsung ke lokasi terdampak untuk melihat kondisi di lapangan.

"Itu harusnya 'leading sektor' dinas lingkungan hidup harusnya cepat menginisiasi, dan langsung turun ke lokasi melihat bagaimana kondisinya," sambungnya.

Selain itu, kata Afif, kondisi warga yang merasakan dampak debu batu bara harus segera ditangani, guna meminimalisir kemungkinan buruk yang menimpa kesehatan penduduk sekitar.

"Kondisinya kan di sana juga banyak yang terkena penyakit Ispa, kan itu berbahaya

dan harus cepat diatasi, fungsinya terjun langsung tuh ini," tambahnya.

Arif menuturkannya, masyarakat yang terdampak debu batu bara bisa melaporkan kasus ini ke pihak berwajib untuk dibawa ke ranah hukum.

"Tu sangat bisa masyarakat tentunya bisa untuk melaporkan ke pihak berwajib karena dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat berbahaya, khususnya dampak kesehatan masyarakat sekitar," tandasnya.

Sebelumnya, Dinas LH DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada PT KCN atas pencemaran abu batu bara di lingkungan rusun Marunda.

Pihak KCN juga telah bertemu dengan Dinas LH DKI di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Kamis (17/3), terkait sanksi yang dijatuhkannya.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT KCN yang diterbitkan 14 Maret 2022.

Direktur Operasi PT KCN, Hartono menegaskan, pihaknya berkomitmen melaksanakan sanksi tersebut.

"Prinsipnya sanksi itu perbaikan untuk ke depan. Saya pribadi dan perusahaan akan melaksanakan sanksi tersebut karena dalam sanksi sudah ada batas waktu yang harus dipenuhi," kata Hartono. ● yan

DKI Segera Gelar PTM 100% Lagi

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen akan kembali digelar. Kebijakan ini didasarkan pada pelonggaran kegiatan di sejumlah sektor.

"Insya Allah ya, nggak lama lagi (digelar) kita akan lihat ya. Sejauh ini kan udah banyak yang 100 persen termasuk transportasi publik," kata Riza di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/3).

Kini, Pemprov DKI masih membahas dan mengevaluasi rencana PTM 100% tersebut. "PTM sedang didiskusikan dibahas dan dievaluasi.

Insyallah tidak lama lagi," ungkapnya.

PTM 100% terakhir dilaksanakan di Jakarta pada Januari 2022. Kapasitas PTM lalu dikurangi menjadi 50% karena Covid-19 melonjak.

Dorong PTM 100% Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Abraham Wirotomo mendorong agar PTM 100 persen diberlakukan lagi karena fasilitas internet di beberapa sekolah yang belum memadai. Selain itu, mengingat level PPKM di Jawa-Bali terus turun.

"Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang

dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham dalam keterangan tertulis, Kamis (17/3).

Dia mengatakan, guna menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus Covid-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan testing Covid-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).

Menurutnya, ini adalah salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak.

"Sejauh ini testing ACF di sekolah menurun. Ini menjadi PR bagi pemerintah," ucapnya. ● yan

Pemkab Bekasi Raih Penghargaan Terbaik Pengelolaan DAK Fisik dan Pengelolaan Dana Desa

CIKARANG BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sebagai Terbaik Kelima, Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam Kinerja Pengelolaan Dana Fisik Tahun 2021 dan Terbaik Kelima, Pemerintah Daerah di Jawa Barat dalam Kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.

Penghargaan ini, diberikan langsung secara simbolis oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi, kepada Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (21/3). Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki mengucapkan terimakasih kepada DJPb, yang telah menetapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten Pengelolaan DAK Fisik terbaik. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar bisa terus melakukan perbaikan sehingga mampu mendapat penghargaan terbaik pertama



di tahun 2022. "Saya ucapkan terimakasih kepada DJPb atas penghargaan yang telah diberikan. Mohon arahan dan bimbingan, kami siap menjalankan program-program baik dari pusat dan provinsi. Kami juga akan beru-

paya semaksimal mungkin untuk mendapat terbaik pertama nantinya ditahun 2022," ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (21/3).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kedepannya Pemerintah Kabupaten Bekasi akan merealisasikan keuangan fisik tersebut secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kami akan memantau dan berusaha untuk merealisasikan hal tersebut secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi," katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengatakan DPMD telah melakukan berbagai upaya terkait penyaluran dana desa, yang saat ini dilakukan melalui Internet Banking Corporates (IBC) BJB, sehingga dapat memudahkan Desa untuk penyalurannya dalam bentuk digital.

"Kami telah melakukan berbagai upaya terkait penyaluran ini, jadi kami putuskan

untuk menyalurkannya melalui digital yaitu IBC BJB. Sehingga Desa nantinya tidak usah pergi ke Bank, tapi bisa melalui digital banking," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan akan melakukan berbagai upaya untuk percepatan pencairan dana, salah satunya menjemput bola untuk meninjau langsung ke kepala desa dan memertanyakan kendala yang dihadapi.

"Kami akan langsung menjemput bola, itu salah satu upayanya. Agar kita tahu apa kendalanya sehingga data-data mereka belum masuk," terangnya. ● mdl

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT ANANTARA PARAMA MANDIRI, berkedudukan di Kota Tangerang ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa akan dilakukan pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan milik Nyonya NATALIA LANGKAI dan Nyonya FENNY JAHYA oleh Tuan ANDREW HASLIM. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat di Ruko Palmira Square Alam Sutera, Jalur Sutera 25A Nomor 29, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten 15325. Tangerang, 22 Maret 2022 PT ANANTARA PARAMA MANDIRI Direksi